



STRATEGI PENGEMBANGAN MODAL KOPERASI SIMPAN PINJAM MELALUI BANTUAN LPDB

(Capital Development Strategy Of Credit Union Through LPDB Loans Grant)

**Siti Indah Purwaning Yuwana
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
indah.yuwana@gmail.com**

ABSTRAK. Koperasi merupakan bentuk organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Modal koperasi dapat dikatakan sebagai ‘katalis’ dalam menggerakkan kelancaran penyelenggaraan usaha koperasi. Struktur modal merupakan hal penting bagi koperasi karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial koperasi., diantaranya adalah dinamika perkembangan aset dan SHU. Koperasi merupakan salah satu sektor ekonomi di Indonesia yang berpotensi untuk dikembangkan. Tulisan ini bertujuan mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya dengan menyajikan telaah mengenai keluasan konsep struktur modal koperasi simpan pinjam (KSP), dan bagaimana keberadaan LPDB sebagai bagian dari program pemerintah yang dikeluarkan Kementerian Koperasi dan UMKM, mampu berpengaruh optimal menjadi bagian dari struktur modal KSP tersebut. Keberadaan peran LPDB dapat dimaksimalkan sebagai BLU (Badan Layanan Umum) Kementerian Koperasi dan UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam praktek berkoperasi di Indonesia.

Kata Kunci : Modal, KSP, LPDB, Strategi

ABSTRACT. Cooperative is a form of business organization that is owned and operated by individuals for the common good. Cooperative capital can be said to be a 'catalyst' in moving the smooth running of cooperative business. Capital structure is important for cooperatives because good or bad capital structure will have a direct effect on the cooperative's financial position, including the dynamics of asset development and SHU. Cooperatives are one of the economic sectors in Indonesia that have the potential to be developed. This paper aims to develop previous studies by presenting a study of the breadth of the concept of credit union (KSP) capital structure, and how the existence of LPDB as part of a government program issued by the Ministry of Cooperatives and MSMEs, is able to optimally influence being part of the KSP capital structure. The existence of the role of LPDB can be maximized as a BLU (Public Service Agency) of the Ministry of Cooperatives and MSMEs. This study uses a qualitative method, which is expected to provide benefits in the practice of cooperatives in Indonesia.

Keywords : Capital, Credit Union, LPDB, Strategy



PENDAHULUAN

Koperasi sering disebut sebagai pilar gerakan ekonomi rakyat. Koperasi juga menjadi kunci pengentas kemiskinan dan penyedia lapangan kerja. Kontribusi koperasi untuk Produk Domestik Brutto (PDB) Indonesia adalah 4,48% tahun 2017 pada kuartal III. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2016. Peningkatan jumlah koperasi yang telah mencapai 153.171 unit hingga Desember 2017, menjelaskan bahwa eksistensi gerakan perekonomian rakyat yang makin meningkat sehingga mendorong perekonomian Indonesia. (“Koperasi Sumbang 4,48 Persen ke PDB Indonesia, *Republika.co.id*, 5 Januari 2018).

Modal Koperasi dapat dikatakan sebagai ‘*katalis*’ dalam menggerakkan kelancaran penyelenggaraan usaha Koperasi. Usaha Koperasi itu sendiri merupakan bentuk pengorganisasian usaha yang didasari atas mandat melayani kebutuhan anggota dan juga peluang bisnis kepada non anggota. Struktur Modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian. Untuk itu, dalam penetapan struktur modal perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang mempengaruhinya. Struktur modal merupakan masalah yang penting bagi koperasi karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial koperasi.

Struktur modal Koperasi merupakan salah satu elemen pengaturan di dalam UU nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pengaturan struktur modal Koperasi pada UU ini dipahami sebagai suatu upaya kreatif untuk mendorong pemanfaatan beragam pilihan struktur modal, baik dari sumber modal internal anggota dan eksternal Koperasi, sehingga Koperasi mampu menjamin ketersediaan dan stabilitas modalnya.

Lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi merupakan salah satu lembaga yang mampu membiayai kegiatan bisnis UMKM, sebab lembaga keuangan berbentuk koperasi mampu menyesuaikan ritme dan karakter yang melekat pada usaha mikro, kecil, dan menengah, artinya bahwa pendekatan dengan mengembangkan lembaga keuangan mikro terutama dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah cukup bijaksana (Sumodiningrat, 2014)

Peran koperasi simpan pinjam dalam menunjang bisnis berbasis rakyat akan lebih optimal bila ditunjang dengan system perencanaan yang terpadu, berkelanjutan dan ditopang dengan anggaran yang memadai. Untuk memperkuat posisi koperasi simpan pinjam maka ketersediaan modal bagi pelaku usaha koperasi simpan pinjam merupakan sebuah keharusan. Keterbatasan modal yang dimiliki koperasi simpan pinjam merupakan hambatan struktural untuk mengembangkan usaha koperasi, sehingga koperasi belum memiliki kemampuan untuk



menjalankan peranannya secara efektif. Kelangkaan modal pada koperasi simpan pinjam menjadi faktor yang menyebabkan lemahnya perkoperasian di Indonesia selama ini. (Pandji dan Widiyanti, 2007)

Peran pemerintah sebagai penyedia bantuan modal koperasi simpan pinjam ditunjukkan dengan adanya beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan, seperti kebijakan pembentukan KUD (Koperasi Unit Desa), yang awal dikembangkan khusus untuk sektor pertanian, sebagai wadah simpan pinjam. Program pemerintah selanjutnya adalah subsidi KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan Dana Bergulir, yang juga memberikan bantuan dana untuk modal usaha. Tahun 2006, Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah membentuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). LPDB-KUMKM ini bertugas memberikan pinjaman dana bergulir bagi koperasi simpan pinjam guna memperkuat usaha koperasi simpan pinjam. Data LPDB-KUMKM sampai tahun 2017 menyebutkan jumlah penerima dana bergulir di seluruh Indonesia mencapai 983 koperasi. Kota Malang merupakan salah satu wilayah yang beberapa koperasinya menerima dana bergulir Kementerian Koperasi dan UKM.

Penelitian Sarwoko (2009) menjelaskan bahwa KSP di Kabupaten Malang mampu menyalurkan kredit modal kerja ke UMKM sebesar 79,81% dari total kredit yang disalurkan. Tingginya

kemampuan KSP dalam penyaluran kredit menunjukkan semakin meningkatnya peran KSP dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Ada lima indikator yang digunakan dalam penelitian tersebut. Sejumlah 4 indikator yaitu jumlah, anggota, penyerapan tenaga kerja, modal sendiri, serta indikator volume usaha semuanya mengalami peningkatan, namun hanya satu indikator yaitu modal pinjaman mengalami penurunan. Permasalahan yang diidentifikasi dalam perkembangan KSP adalah rendahnya kemampuan SDM, lemahnya tata kelola, dan belum optimalnya pembinaan dari pemerintah. Hasil penelitian Azhari, *et al.* (2017), KSP dapat menjadi lembaga keuangan mikro yang *sustainable* apabila ada efektivitas kebijakan publik dan permodalan didukung dengan baik.

Penelitian terdahulu hanya melihat kontribusi KSP dalam memenuhi permodalan usaha mikro dan pengaruhnya terhadap ekonomi rakyat, tidak mencakup penjelasan rinci struktur modal yang digunakan KSP tersebut. Tulisan ini bertujuan mengembangkan penelitian penelitian sebelumnya dengan menyajikan telaah mengenai keluasan konsep struktur modal koperasi simpan pinjam, dan bagaimana keberadaan LPDB sebagai bagian dari program pemerintah yang dikeluarkan, mampu berpengaruh optimal menjadi bagian dari struktur modal KSP tersebut, sehingga peran LPDB dapat dimaksimalkan sebagai BLU (Badan Layanan Umum) Kementerian Koperasi.



Tulisan ini bertujuan mengetahui bagaimana Pengaruh Bantuan LPDB Kementerian Koperasi dan UMKM terhadap Kondisi Keuangan koperasi, termasuk didalamnya perkembangan Struktur Modal Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Selain itu, bagaimana perbandingan perkembangan struktur modal KSP yang menggunakan bantuan dana LPDB dengan yang tidak menggunakan. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif, yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam praktek berkoperasi di Indonesia.

METODE

Menurut Hilman dkk (2018) metode kajian diuraikan secara terinci, demikian juga langkah-langkah kerjanya (prosedur penelitiannya). Jika metode mengacu pada prosedur standar, haruslah menuliskan standarnya. Diketik dengan Calibri, ukuran 11pt, spasi 1.5, dan Justify. Ditulis dalam satu bab bisa dengan sub judul. Setiap kutipan dari buku atau artikel jurnal, cantumkan sumbernya di daftar pustaka berdasarkan ketentuan dan standar APA (*American Psychological Association*).

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang belum ada teorinya sehingga peneliti harus berusaha menemukan teori tersebut. Hasilnya bukan berupa angka, melainkan kata-kata atau kalimat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan perilaku yang dapat diamati serta bersifat

interpretif yang melibatkan banyak metode, dalam menelaah masalah penelitiannya (Mulyana, 2010). Penelitian kualitatif digunakan untuk melihat berbagai fenomena sosial. Hasilnya tidak berupa angka seperti kuantitatif, melainkan kumpulan kalimat, kata yang akan diuji kebenarannya. Ketelitian dan akurasi yang tepat diperlukan karena kualitatif membutuhkan pengamatan di lapangan.

b. Tempat Penelitian

Penelitian ilmiah ini dilaksanakan di dua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Malang, yaitu pada KSP yang sudah mendapat dana bantuan dari LPDB bernama Koperasi Mitra Sejahtera Bersama, dan KSP yang belum mendapatkan dana bantuan dari LPDB diberi nama Koperasi Citra Persada Nusantara Sejahtera. Malang adalah salah satu kota di Jawa Timur dan Indonesia yang paling banyak memiliki koperasi aktif dan perkembangannya begitu menggeliat, sehingga penulis menganggap bisa menjadi salah satu percontohan yang baik untuk digunakan sebagai studi kasus penelitian.

c. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer dalam penulisan ini diperoleh melalui wawancara kepada responden yang dianggap mengetahui bagaimana proses mulai dari penyaluran dana bergulir bagi koperasi simpan pinjam sampai pada

pengaruhnya bagi perkembangan struktur modal, aset dan SHU Koperasi. Selain dengan wawancara, penulis juga memperoleh data primer melalui pengamatan langsung di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung data primer, karena diperlukan keterkaitan dengan teori-teori yang relevan. Penulis dalam hal ini memanfaatkan buku-buku, jurnal, internet atau sumber data lain yang akan menunjang dari apa yang akan diteliti.

d. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Penulisan ini menggunakan wawancara sebagai teknik yang utama dalam menggali informasi tentang pemanfaatan dana LPDB pada Koperasi Simpan Pinjam, khususnya yang terletak di Kota Malang. Berasal dari wawancara dengan responden diketahui informasi secara garis besar tentang peranan dana bergulir sebagai bantuan modal dalam mempengaruhi perkembangan finansial koperasi.

2) Observasi

Penulis dalam observasi ini mengamati bagaimana proses penyaluran dana bantuan modal LPDB kepada Koperasi Simpan

Pinjam, kemudian penggunaannya di kantor operasional berkaitan dengan pembiayaan yang dilakukan, serta efek program LPDB yang ditimbulkan bagi perkembangan ekonomi Koperasi Simpan Pinjam di Kota Malang tersebut.

3) Studi Pustaka

Penulis melalui studi pustaka ini menggali informasi dengan bantuan referensi, berupa buku-buku, jurnal, internet dan dokumen milik obyek yang diteliti.

e. Teknik Penetapan Informan

Penulis dalam menentukan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu, penentuan sampel dengan target atau pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009). Narasumber dipilih sesuai dengan latar belakang yang dianggap mengetahui tentang bagaimana proses penyaluran dana bantuan modal LPDB kepada Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat dana LPDB. Awal pertama yang ditanyai adalah Salah satu Pengurus Koperasi Simpan Pinjam MSB di Kota Malang, kemudian selanjutnya adalah Manajer dari Koperasi Simpan Pinjam Citra Persada Nusantara Sejahtera yang merupakan sampel KSP yang belum pernah memperoleh bantuan dana LPDB untuk penambahan struktur modalnya. Para narasumber adalah orang-orang yang sangat paham akan koperasinya, sehingga penulis mudah menggali informasi yang dibutuhkan



untuk menjaga validitas data yang mendukung dalam penulisan karya tulis ini. Sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bapak Arif Dwi Hariyanto, SE., terpilihnya beliau dengan alasan bahwa jabatan yang bersangkutan sebagai salah satu pengurus Koperasi Simpan Pinjam MSB Kota Malang, dianggap mengetahui bagaimana jalannya dana bantuan LPDB dari waktu ke waktu. Responden sebagai seorang Sekretaris Koperasi yang ikut serta dalam setiap prosesnya diharapkan dapat memudahkan menggali informasi melalui narasumber yang lain.
- 2) Bapak Yoan Baskara, ST sebagai Manager di Kantor Operasional KSP Citra Persada Nusantara Sejahtera, mempunyai kemudahan akses berbagai data yang akan mendukung peneliti dalam menggali informasi yang diperlukan terkait perkembangan laporan keuangan atas bisnis yang sudah dilakukan oleh KSP sejauh ini.

f. Validitas Data

Untuk membuktikan kebenaran data maka perlu dilakukan validitas data, dengan membandingkan data yang diperoleh dengan data yang lain. Digunakan triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong,

2012).

g. Teknik Analisis Data

Karya Ilmiah ini menggunakan teknik analisis data model analisis interaktif. Jadi selain berusaha menggambarkan keadaan kedua koperasi yang menjadi subyek penelitian, tujuan analisis ini adalah untuk menyederhanakan suatu data agar mudah dibaca. Menurut Sugiyono (2016), ada tiga komponen pokok dalam menyusun penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi merupakan saka guru perekonomian nasional, sehingga dalam kehidupan ekonomi bangsa Indonesia koperasi sangat penting. Peranan koperasi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian sebagai berikut : Koperasi sebagai gerakan untuk membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya, kemudian Koperasi berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat, Koperasi memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dan Koperasi mewujudkan serta mengembangkan sistem perekonomian nasional berdasarkan atas asas



kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Indonesia sebagai Negara berkembang menduduki peringkat lima besar dalam hal jumlah penduduk, merupakan pasar potensial yang subur bagi berkembangnya lembaga keuangan mikro. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. LKM hanya dapat dimiliki oleh : Warga Negara Indonesia, Badan usaha milik desa/kelurahan, Pemerintah daerah kabupaten/kota atau Koperasi. LKM dilarang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, oleh warga negara asing atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing. (www.ojk.go.id/IKNB)

Bank Indonesia memberikan definisi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dibagi menjadi dua kategori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Kredit Desa (BKD), sedangkan yang bersifat non bank adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), Baitul Mal Wattamil (BMT),

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Koperasi khususnya yang bergerak dalam usaha simpan pinjam, yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah lembaga keuangan mikro formal yang dapat melayani masyarakat terutama anggotanya dalam keperluannya untuk menyimpan dan meminjam dana. (www.bi.go.id)

Koperasi dalam menjalankan usaha koperasinya dituntut berjalan dengan ideal dimana pemerintah harus mampu menjelaskan posisi koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia kepada masyarakat luas, artinya koperasi yang benar-benar menjalankan prinsip perkoperasian sesuai undang-undang, bukan koperasi yang menyalahgunakan wewenang dengan cara membawa lari dana anggotanya. Berawal dari kondisi semacam ini citra koperasi akhirnya menjadi kurang baik dan menjadi tidak dipercaya oleh masyarakat sekitar. Menurunnya dana yang dikelola sebagai bagian dari struktur modal koperasi menjadi salah satu penyebab turunnya efektivitas dan produktivitas koperasi. Gambaran koperasi yang terpuruk karena permasalahan modal menjadi latarbelakang munculnya ide dari pemerintah dalam melaksanakan bantuan modal kepada koperasi, salah satunya adalah program LPDB dari kementerian Koperasi dan UMKM.

Sebenarnya sebelum program dana LPDB diluncurkan di Indonesia, telah dilakukan berbagai macam strategi dalam usaha mengembangkan Koperasi. Hampir semua bentuk intervensi yang



diketahui pernah diaplikasikan, antara lain program-program pelatihan *technical skills* dan kewirausahaan, konsultasi pemberdayaan karyawan, subsidi input, peningkatan infrastruktur, pembangunan fasilitas publik, pembangunan sentra-sentra industri, kredit subsidi dan lainnya. Kesimpulan umum yang diperoleh adalah bahwa sebagian besar program tersebut memberikan pengaruh yang masih sedikit terhadap perkembangan finansial koperasi. Sebagian besar disebabkan oleh terbatasnya dana yang dialokasikan untuk modal, dimana begitu banyaknya program dengan jumlah koperasi yang begitu besar.

Penyaluran dana bergulir Kementerian Koperasi dan UMKM ditujukan untuk meningkatkan pengembangan usaha koperasi simpan pinjam, tidak terkecuali KSP di Kota Malang. Tujuannya koperasi diharapkan mampu meningkatkan usaha bisnis rakyat dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Malang. Sampai dengan akhir 2017, berdasarkan data Dinas Koperasi Kota Malang, bantuan modal Kementerian Koperasi telah digulirkan kepada lima koperasi besar di Kota Malang yang bergerak di bidang simpan pinjam, yang menjadi Debitur LPDB.

Banyaknya koperasi di Kota Malang yang aktif tidak sebanding dengan jumlah koperasi yang mendapatkan bantuan modal LPDB tersebut. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa daya serap dana bergulir tersebut masih rendah di Kota

Malang. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan, apa yang menjadi hambatan koperasi-koperasi tersebut untuk bisa menikmati bantuan dana dari Kementerian Koperasi dan UMKM tersebut. Namun, yang menjadi fokus dalam penulisan ini adalah lebih pada bagaimana pengaruh nyata bantuan dana LPDB tersebut bagi KSP di Kota Malang, kemudian selanjutnya dikaji lebih rinci lagi bagaimana perbandingan perkembangan Koperasi yang mendapatkan dana LPDB dengan Koperasi yang tidak menggunakan dana LPDB dalam struktur modalnya. Penulis berharap melalui hasil penulisan ini memberikan gambaran bagaimana perkembangan koperasi yang menggunakan dana LPDB, sehingga dapat menjadi pertimbangan agar daya serap dana LPDB semakin meningkat di Kota Malang. Sampel KSP yang dijadikan obyek penelitian pada penulisan ilmiah ini ada dua, diantaranya KSP di Kota Malang yang sudah menggunakan dana LPDB dalam struktur modalnya, yaitu Koperasi Mitra Sejahtera Bersama (MSB) dan yang belum menggunakan dana LPDB, yaitu Koperasi Citra Persada Nusantara Sejahtera (CPNS).

Berikut akan dijelaskan dalam bentuk Tabel 4.1 sampai dengan Tabel 4.4, perbandingan perkembangan koperasi, baik dari segi keuangan, modal maupun perbandingan antara dua koperasi yang mendapat dana bergulir dan yang tidak mendapatkannya. Tabel 4.1 menggambarkan secara keseluruhan posisi keuangan KSP Mitra



Sejahtera Bersama, yang terdiri atas aset, pemberian pinjaman (KYD), modal dan SHU. Data laporan keuangan ini kemudian dianalisis untuk mengetahui berapa besar prosentase pengembangan usaha koperasi simpan pinjam. Tahun 2013 adalah tahun pertama KSP Mitra Sejahtera Bersama mendapatkan bantuan Dana Bergulir LPDB. Berdasarkan data keuangan KSP Mitra Sejahtera Bersama, dapat dilihat nilai aset mengalami peningkatan setelah menerima dana bergulir pada tahun 2013. KSP Mitra Sejahtera Bersama juga mengalami peningkatan yang signifikan dengan adanya dana bergulir LPDB. Kondisi ini diamati berdasarkan nilai modal yang naik 70% dari Tahun 2012.

Tabel 4.1
Data Keuangan KSP Mitra Sejahtera Bersama
(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Data Keuangan	Sebelum Menerima Dana Bergulir	Sesudah Menerima Dana Bergulir
		2012	2013
1	KYD (Kredit Yang Diberikan)	2.108.872	5.130.034
2	ASET	2.561.566	5.979.740
3	MODAL	644.622	1.095.000
4	SHU	5.504	86.882

Sumber : Data Dokumen KSP MSB

Tabel 4.2
Data Struktur Modal KSP Mitra Sejahtera Bersama
(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Jenis Modal	Sebelum Menerima Dana Bergulir	Sesudah Menerima Dana Bergulir
		(2012)	(2013)
1	Modal Sendiri	344.622	106.030
2	Modal Pinjaman :		

a. Bank X	300.000	210.498
b. Bank Y	0	156.250
c. LPDB	0	622.222

Sumber : Data Dokumen KSP MSB

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat digambarkan bahwa data modal sendiri KSP Mitra Sejahtera Bersama di Kota Malang mengalami penurunan. Namun, di sisi lain, secara keseluruhan nilai modal mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi ini memberikan penjelasan bahwa LPDB mampu menjadi bagian struktur modal KSP, dan pengaruhnya besar terhadap perubahan modal, baik yang sifatnya modal sendiri, maupun modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan yang lain.

Semakin tinggi perkembangan modal koperasi maka perputaran pinjaman koperasi akan semakin lancar dan akan memperoleh pendapatan yang salah satunya dialokasikan ke SHU. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa modal secara nyata berpengaruh positif terhadap peningkatan perolehan SHU Koperasi Simpan Pinjam di Kota Malang. Dengan adanya bantuan dana LPDB dari Kementerian Koperasi dan UMKM, maka untuk memenuhi modal koperasi pengurus tidak terpaku pada usaha aktif, menggerakkan anggotanya untuk berperan serta dalam pemupukan modal koperasi dengan jalan mengajak anggota menaikkan jumlah simpanan pokok dan wajib.

Tabel 4.3
Data Keuangan KSP Citra Persada Nusantara Sejahtera

No.	Data Keuangan	2019	2020
1	KYD (Kredit Yang Diberikan)	823.970.100	834.686.480
2	Modal Sendiri	361.057.327	342.315.013
3	Modal Pinjaman (Bank X)	525.071.224	479.109.255
4	SHU	9.354.918	13.602.462
5	Aset	875.990.700	897.263.457

Sumber : Data Dokumen KSP CPNS

Tabel 4.3 mendeskripsikan kondisi keuangan KSP Citra Persada Nusantara Sejahtera, yaitu salah satu dari banyak KSP di Kota Malang yang belum menikmati dana bergulir. Data Keuangan tersebut menunjukkan bahwa dibandingkan tahun 2019 mengalami peningkatan dari segi aset, namun peningkatannya tidak signifikan. Selain itu, dari segi SHU, peningkatannya sangat kecil sekali. Dilihat dari segi modal dan pemberian pinjaman, oleh KSP CPNS, kondisinya cenderung tetap.

Tahun 2019 menjadi tahun keenam KSP MSB menjalani bantuan dana LPDB. Bila dibandingkan dengan KSP CPNS pada tahun yang sama, Tabel 4.4 menggambarkan bahwa perbandingan dari segi SHU sangat timpang sekali antara dua KSP ini. Begitu juga dengan nilai aset dan KYD nya. Tentu

saja hal ini memberikan penjelasan bahwa sangat perlu bagi koperasi-koperasi, khususnya di Kota Malang, untuk mampu menyerap dana bantuan LPDB dari Kementerian Koperasi dan UMKM dalam bisnis usaha simpan pinjamnya. Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4.4, dapat dilihat bahwa Koperasi Simpan Pinjam di Kota Malang yang menggunakan bantuan LPDB sebagai bagian dari struktur modalnya, mampu lebih maju dan berkembang cepat dilihat dari seluruh aspek, bila dibandingkan dengan KSP yang hanya mengandalkan modal dari anggotanya sendiri.

Tabel 4.4
Perbandingan Data Keuangan KSP Mitra Sejahtera Bersama dan KSP Citra Persada Nusantara Sejahtera Tahun 2019

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Data Keuangan	Mitra Sejahtera Bersama	Citra Persada Nusantara Sejahtera
1	Modal :		
	a. Modal Sendiri	701.251	361.057
	b. Modal Pinjaman (Bank X)	0	525.071
	c. Modal Pinjaman (LPDB)	155.555	0
2	KYD	3.976.994	823.970
3	Aset	4.936.250	875.991
4	SHU	195.167	9.355

Sumber: Data Dokumen KSP MSB dan CPNS

Peraturan Menteri Keuangan No.99/PMK.05/2008 Pasal 2, menjelaskan tujuan dari dana bergulir adalah untuk membantu kekuatan modal usaha guna pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan,



pengangguran, dan pengembangan ekonomi nasional. Urhen (2011) berpendapat bahwa tujuan dana bergulir adalah membantu perkuatan modal usaha guna pemberdayaan koperasi dan UMKM, meningkatkan aktivitas ekonomi pedesaan, meningkatkan volume usaha koperasi dan UMKM, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan semangat koperasi, meningkatkan pendapatan anggota, dan membangkitkan etos kerja. Berdasarkan beberapa teori tersebut, dana bergulir memiliki pengaruh terhadap pengembangan usaha koperasi yang dilihat dengan meningkatnya nilai pembiayaan, meningkatnya modal, dan meningkatnya pendapatan (SHU).

Hasil penelitian yang ditunjukkan Tabel 4.1 menjelaskan bahwa Dana LPDB berpengaruh signifikan terhadap perkembangan nilai laporan keuangan KSP Mitra Sejahtera Bersama. Hasil penelitian ini memperkuat kesimpulan penelitian sebelumnya, dimana Retnadi (2007) menyatakan bahwa KSP dapat menjadi lembaga keuangan mikro yang kuat apabila kebijakan pemerintah cukup kondusif yang menyangkut aspek - aspek peningkatan efektivitas regulasi dan supervisi, kapasitas kelembagaan, serta permodalan. Program LPDB ini merupakan salah satu program Pemerintah dalam rangka memenuhi aspek-aspek tersebut, khususnya pemenuhan bantuan permodalan Koperasi Simpan Pinjam.

Tahun pertama setelah menerima dana bergulir (2013) aset KSP Mitra Sejahtera Bersama

mengalami kenaikan seperti ditunjukkan Tabel 4.1. Setelah menerima dana bergulir nilai aset koperasi meningkat tetapi meningkatnya karena dana bergulir ini tidak berpengaruh untuk nilai aset pada seluruh koperasi simpan pinjam di Kota Malang.

Hasil penelitian ini memperkuat kedudukan dan kiprah koperasi simpan pinjam sebagaimana diteliti Subandi (2007), ditemukan bahwa salah satu solusi yang diperlukan untuk memberdayakan koperasi simpan pinjam sekarang ini adalah upaya nyata dari pihak-pihak terkait khususnya pemerintah untuk melakukan pembenahan dalam rangka penguatan struktur modal koperasi simpan pinjam. Adanya bantuan modal LPDB sebagai program pemerintah dalam rangka penguatan modal berpengaruh signifikan terhadap pengembangan struktur modal KSP Mitra Sejahtera Bersama. Ada pengaruh positif perkembangan modal terhadap peningkatan perolehan SHU Koperasi Simpan Pinjam di Kota Malang. Semakin tinggi perkembangan modal koperasi maka perputaran koperasi akan semakin lancar dan akan memperoleh pendapatan yang salah satunya dialokasikan ke SHU.

Hal yang dapat dijelaskan dari hasil penelitian yang digambarkan Tabel 4.3 adalah KSP Citra Persada Nusantara Sejahtera di Kota Malang, yang tidak menggunakan dana LPDB dalam struktur modalnya tetap mengalami kenaikan dalam hal pendapatan (SHU) dan Aset, namun peningkatannya tidak signifikan dan prosentasenya



kecil sekali. Dengan nilai aset yang naik, seharusnya diikuti nilai pemberian pinjaman yang juga naik. Tetapi hasil penelitian menunjukkan Pembiayaan KSP Citra Persada Nusantara Sejahtera sangat kecil sekali dan tidak signifikan.

KSP mempunyai peluang menjadi lembaga keuangan yang baik, sehat dan dipercaya masyarakat. Kuncinya adalah apabila dibangun dan dikembangkan bersama anggotanya dengan baik (Sarwoko, 2009). Oleh karena itu, menurut hemat Penulis, peluang tersebut akan lebih mudah dapat dicapai apabila didukung oleh adanya perundangan atau kebijakan yang memadai dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terkait untuk mengembangkan KSP dengan baik dan benar. KSP akan lebih maju pesat apabila didukung kuat oleh adanya sistem pengembangan keuangan dan pemodal koperasi yang terintegrasi, dimana dalam hal ini pengoptimalan struktur modal dilakukan dengan bantuan dana LPDB program Kementerian Koperasi dan UMKM signifikan berpengaruh.

Perbedaan yang sangat jauh dilihat dari data laporan keuangan antara KSP Mitra Sejahtera Bersama dan KSP Citra Persada Nusantara Sejahtera pada Tabel 4.4. Adanya pinjaman LPDB dalam struktur modal KSP Mitra Sejahtera Bersama mampu memberikan nilai SHU yang sangat tinggi dan akses pemberian pinjaman yang lebih besar, dibandingkan KSP Citra Persada Nusantara Sejahtera yang perubahan nilai KYD (Kredit Yang

Diberikan) dan SHU nya cenderung stagnan.

Kinerja koperasi terus bertumbuh karena banyaknya kemudahan aturan serta insentif yang diberikan pemerintah. Sasaran pengembangan Koperasi dan UMKM adalah meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai PDB koperasi di Indonesia. Seperti diketahui bahwa koperasi menyumbang prosentase nilai PDB Negara. Hal ini berarti bi kegiatan bisnis usaha koperasi memiliki potensi baik untuk dikembangkan dengan baik, khususnya pada koperasi simpan pinjam.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di koperasi simpan pinjam yang berada di Kota Malang, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Adanya pinjaman LPDB dalam struktur modal koperasi simpan pinjam berpengaruh positif terhadap pengembangan usaha koperasi simpan pinjam, khususnya apabila dilihat dari segi modal, aset, kredit yang diberikan dan SHU yang dihasilkan.
- b. Pinjaman LPDB dari Kementerian Koperasi dan UMKM mampu meningkatkan struktur modal koperasi simpan pinjam, sehingga berpengaruh pada perluasan akses pembiayaan dan besarnya pencapaian SHU yang tinggi. Ada pengaruh positif perkembangan modal terhadap peningkatan perolehan SHU Koperasi Simpan Pinjam di Kota Malang. Semakin tinggi



perkembangan modal koperasi maka perputaran koperasi akan semakin lancar dan akan memperoleh pendapatan yang salah satunya dialokasikan ke SHU.

- c. Perkembangan usaha koperasi simpan pinjam yang menggunakan pinjaman LPDB dalam struktur modalnya lebih cepat maju bila dibandingkan koperasi simpan pinjam yang hanya mengandalkan modal sendiri dari anggotanya.

Berdasarkan pada pelaksanaan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam ini dapat direkomendasikan saran kepada berbagai pihak, sebagai berikut:

- a. Dana LPDB sudah disediakan oleh Pemerintah, namun tidak semua KSP bisa menikmatinya. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan penyerapan dana LPDB dibutuhkan pendampingan yang lebih masif dari pihak Dinas Koperasi dan UMKM tentang sosialisasi penggunaan dana.
- b. Perlu sosialisasi dan pendampingan pada masyarakat tentang kapasitas koperasi simpan pinjam, dan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas tersebut.
- c. Analisis dalam penelitian ini hanya menggunakan kajian deskriptif berdasarkan data laporan keuangan Koperasi yang diperjelas dengan wawancara kepada

pengurus dan pengelola koperasi. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan uji beda atau regresi untuk menguatkan hasil analisis deskriptif tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, et al. The Role of Cooperative in the Indonesian Economy. 2017. *International Journal of Humanities and Social Science Invention, Vol. 6, Issue 10. Oktober 2017. ISSN: 2319 – 7722.*
- Burhanuddin. 2010. Evaluasi Program Bantuan Dana Bergulir Melalui KSP/USP Koperasi (Pola PKPSBBM, Agribisnis dan Syariah). *Jurnal Pengkajian Koperasi Dan UKM Nomor 1.*
- Deddy, Mulyana. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.*
- Koperasi Kredit (Kopdit). *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM, Vol.4. Agustus 2009. ISSN: 1978 – 2896*
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/VI/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.



- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1992
Tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.
- Pandji, Anoraga dan Widiyanti, Ninik. 2007.
Dinamika Koperasi. Jakarta: Rineks Cipta dan
Bina Adiaksara.
- Panggabean, Riana. 2009. Analisa Komparatif
Antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan
Koperasi Kredit (KOPDIT). *Jurnal Volume 4*,
Agustus 2009:37-61.
- Sarwoko, Endi. 2009. Analisis Peranan
Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan
Pinjam dalam upaya pengembangan UMKM
di Kabupaten Malang. *Jurnal MODERNISASI*,
Volume 5, Nomor 3, Oktober 2009
- Subandi, Slamet. 2007. Kedudukan dan Kiprah
Koperasi dalam Mendukung Pemberdayaan
UMKM. *Jurnal Pengkajian Koperasi dan
UKM*, Nomor 1.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta
- Sulaeman, Suhendar. 2004. Analisis Manfaat
Lembaga Keuangan Berbentuk Koperasi
(KSP/USP). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, No.2*,
Jilid 9
- Sumodiningrat, Gunawan. 2014. Kebijakan
Pemberdayaan UMKM dan Koperasi dalam
Rangka Penguatan Ekonomi Kerakyatan.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
Surakarta: UNS.
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang
Perkoperasian. Undang-Undang RI Nomor
10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Urhen, Lukman. Kebijakan Program Bantuan Dana
Bergulir Dalam Pengembangan KUMKM
Nasional. : Temu Mitra Nasional di Batam
2011. Dokumen Lembaga Pengelola Dana
Bergulir. 14 Desember 2011.